

## **Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado**

### *Analysis of Regional Financial Statement Presentation Based on Government Accounting Standards at the Manado City Public Works and Spatial Planning Office*

Alva O. Sumanti<sup>1</sup>, Jullie J. Sondakh<sup>2</sup>, Peter M. Kapojos<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : [alvasumanti@gmail.com](mailto:alvasumanti@gmail.com)

**ABSTRAK** : Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pernyataan Penyajian Laporan Keuangan bertujuan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dimana data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado tahun anggaran 2014-2018 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sudah menyajikan 4 laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

**Kata kunci**: laporan keuangan, standar akuntansi, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan.

**ABSTRACT** : Government Accounting Standards are accounting principles applied in preparing and presenting government financial reports, both central and regional. Statement of Financial Statement Presentation aims to regulate the presentation of (general purpose financial statements) in order to increase the comparability of financial statements both against budgets, between periods, and between entities. To achieve these objectives, this standard establishes all considerations in the context of the presentation of financial statements, guidelines for the structure of financial statements, and minimum requirements for the content of financial statements. The analytical method used is a qualitative method where the data collected is then classified and analyzed so that conclusions can be drawn. The results showed that the presentation of financial statements at the Manado City Public Works and Spatial Planning Office for the 2017-2018 fiscal year was in accordance with Government Regulation no. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The Manado City Public Works and Spatial Planning Office has presented 4 financial reports, namely the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, and Notes to Financial Statements.

Diterima: 16-01-2022; Disetujui untuk Publikasi: 21-01-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

**Keywords:** *financial reports, budget realization reports, balance sheets, operational reports, notes to financial statements, accounting standards.*

## 1. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2010 diterbitkan PP No. 71 tahun 2010 yang mengatur penerapan basis akrual secara penuh atas laporan keuangan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tersebut terdapat lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu memerlukan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintahan daerah, yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala daerah untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Tanggung jawab bagian keuangan suatu entitas akuntansi adalah memberikan laporan keuangan secara berkala tujuannya untuk dapat mengetahui dan menilai kinerja dari suatu entitas tersebut apakah efektif dan efisien.

Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang diharapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap daerah otonom kabupaten/kota maupun propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Sejalan dengan akan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan direvisinya PP No.24 Tahun 2005 menjadi PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, membawa beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan di pemerintah, serta didukung dengan ditetapkannya Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, maka peneliti akan menganalisis penyajian laporan keuangan dan kesiapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangannya yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado masih mengalami kendala atau masalah yang menyebabkan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berjalan mulus yang diharapkan.

Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado mengelola potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Keuangan secara optimal harus diterapkan dengan prinsip-prinsip "*good governance*" yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan yang ada yaitu untuk mengevaluasi penyajian laporan keuangan yang diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

## 2. TINJAUAN PUSTAKAL

**Akuntansi**, Akuntansi berasal dari kata “*to account*” yang artinya memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas keparcayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi merupakan proses melakukan pencatatan, pengikhtisaran, serta laporan seluruh transaksi keuangan perusahaan yang dilakukan secara rutin sebagai alat informasi keuangan.

**Akuntansi Sektor Publik**, Menurut Bastian (2014:6), Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Mardiasmo (2014:14), akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Konsep dasar dari fungsi akuntansi sektor publik adalah pertanggungjawaban pengurusan keuangan publik dimana akuntansi sektor publik secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan, adapun bentuk pertanggungjawaban berupa laporan keuangan terhadap beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan, dilihat dari sisi internal pemerintahan. Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasi, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

**Standar Akuntansi Pemerintah**, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberikan judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah.

**Kualitas Laporan Keuangan**, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Faud (2016:5) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Tujuan umum laporan keuangan, menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

**Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami

**Entitas Pelaporan Keuangan**, Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan akuntabel, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi, evaluasi Kinerja

**Komponen Laporan Keuangan Pemerintah**, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yaitu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

**Penelitian Terdahulu**, Kema(2013), Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado mendapatkan hasil bahwa pemerintah Kota Manado pada tahun 2011 dalam penyajian laporan keuangan yang mengacu pada SAP, terlihat pada pos bagian hasil kepada pemerintah desa pada pas belanja serta biaya dibayar dimuka pada asset lancar. Langelo, Saerang & Alexander(2015), Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung mendapatkan hasil bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi sesuai dengan PP no. 24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. Hehanussa(2015) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kotah Ambon mendapat hasil bahwa secara parsial penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Ambon berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Herawati dan Nopianti(2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan hasil bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Widyastuti, Sujana dan Adiputra(2015) Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Gianyar mendapatkan hasil bahwa kesiapan dari SDM pemerintah Kabupaten Gianyar belum siap karena masih dalam tahap pembelajaran untuk memahami penerapan SAP berbasis akrual.

### 3 METODE PENELITIAN

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan kepala, bendahara dan verivikator administrasi keuangan disubbagian program keuangan & pelaporan dan dokumen-dokumen tentang gambaran umum maupun sejarah dari kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Manado. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan periode 2017-2018.

Sumber data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado yang berupa Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan dokumen yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2017-2018. Data sekunder yang diperoleh dari literature yang digunakan sebagai salah satu bahan acuan penelitian serta informasi lainnya yang pernah ada berupa karya penelitian pihak lain yang masih relevan dengan penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah metode deskriptif yang berupa wawancara untuk mengetahui Penyajian Laporan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sudah menerapkan SAP Berbasis Akrua. Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang bekenan dengan penelitian ini, maka proses analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Data
2. Mengevaluasi Data
3. Memberikan Kesimpulan

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang telah dilakukan maka akan dibahas, Penyajian Laporan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diteliti lebih lanjut dan dilihat kesesuaiannya.

**Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado,** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dilihat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado telah melakukan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Dimana hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana didalamnya menyajikan unsur-unsur yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Lebih jelasnya penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara, khusus untuk pengeluaran pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya didasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban oleh kepala subbagian program keuangan & pelaporan. Laporan realisasi anggaran yang menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit dalam

satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

**Penyajian Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado**, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dilihat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado telah melakukan Penyajian neraca. Dimana hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan perlu adanya klasifikasi terpisah antar asset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan akan digunakan dalam keperluan jangka panjang. Didalam neraca menyajikan pos-pos yaitu kas dan setara kas, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, asset tetap, dan ekuitas dana.

**Penyajian Laporan Oprasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado**, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dilihat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado telah melakukan Penyajian laporan oprasional. Dimana hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam menyajikan laporan oprasional terdapat pos-pos sebagai berikut pendapatan-LO dari kegiatan oprasional, beban dari kegiatan oprasional, surplus/defisit dari kegiatan non oprasional, pos luar biasa, surplus/defisit-LO. Dalam penyajiannya, Laporan Operasional disajikan paling tidak dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, dalam kasus Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun. Dalam hubungannya dengan laporan oprasional, kegiatan oprasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan oprasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi yang dimaksud, yang telah disajikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Dalam laporan oprasional, surplus/defisit penjualan asset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri yang telah disediakan dengan SIMDA dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.

**Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado**, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dilihat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado telah melakukan Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan. Dimana hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado yaitu SIMDA. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terkecil atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, Laporan Oprasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah suasana penyajian atas pos-pos tertentu dalam catatan atas laporan keuangan.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Melalui penjelasan serta evaluasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulisan dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sudah sesuai dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Baik itu tujuan laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, ruang lingkup dan periode serta kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado masih menggunakan tenaga konsultan dan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah menyediakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia atau pegawai masih rendah dalam menjalankan dan mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sendiri. Salah satu penyebabnya dimana sering terjadinya perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah, yang membutuhkan waktu lama dalam mensosialisasikannya kepada setiap pegawai yang terlibat di dalam penyajian laporan keuangan daerah. Disamping itu juga karena disebabkan oleh keterbatasan perangkat pendukung atau infrastruktur berupa computer dan *software*.

### Saran

Sumber daya manusia adalah suatu unsur yang penting dalam penyajian laporan keuangan ini, untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sebaiknya memberi perhatian dalam hal ini, diantaranya menambah pelatihan dibidang Program Keuangan dan Pelaporan dan penempatan bidang yang tepat dengan keahlian pegawainya masing-masing, karena adanya banyak Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang telah direvisi. Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan kondusif sehingga tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi dan akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Hehanussa, S. J. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. Conference in Business, Accounting, and Manajement 2(1): 82-90.
- Herawati, T. dan D. Nopianti. 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Study and Accounting Research 14(2): 10-45.
- Kema, I. 2013. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado*. Jurnal EMBA 1(3): 771-781.
- Langelo, F., D. P. E. Saerang, dan S.W. Alexander. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA 3(1): 1-8.
- Faud. R. Muhamat 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.

- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Lima. Cetakan Empat. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah daerah*. 6 Desember 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425. Jakarta.
- Pontoh, W. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Penerbit Halaman Moeka Publishing. Jakarta Barat.
- Widyastuti, N. M. A., E. Sujana dan I. M. P. Adiputra. 2015. *Analisis Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Di Kabupaten Gianyar*. Jurnal Akuntansi 3(1):1-1